**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK DI LUAR NIKAH DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SALSABILA MAYLANDA PUTRI**

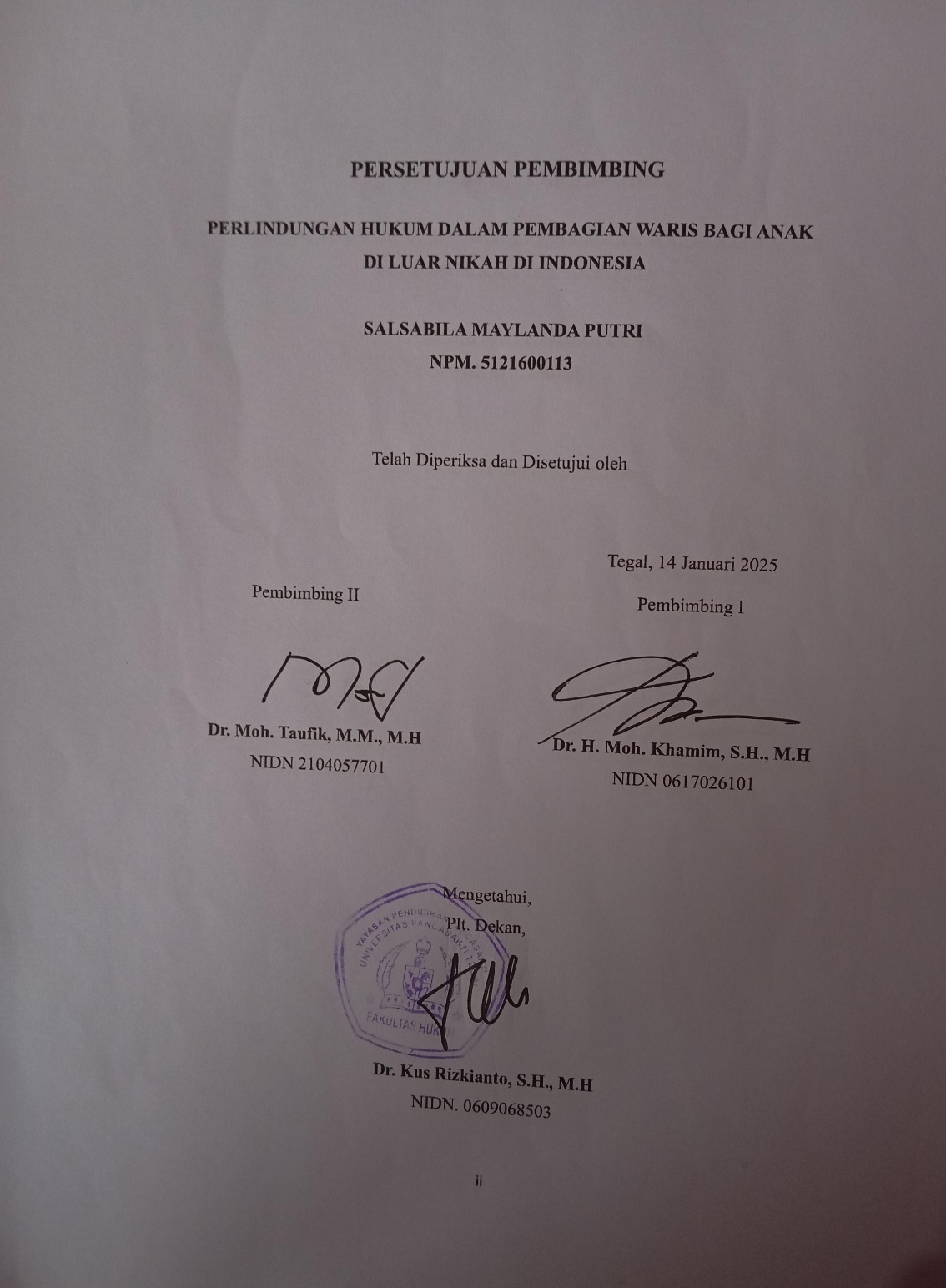
**NPM 5121600113**

**FAKULTAS HUKUM**

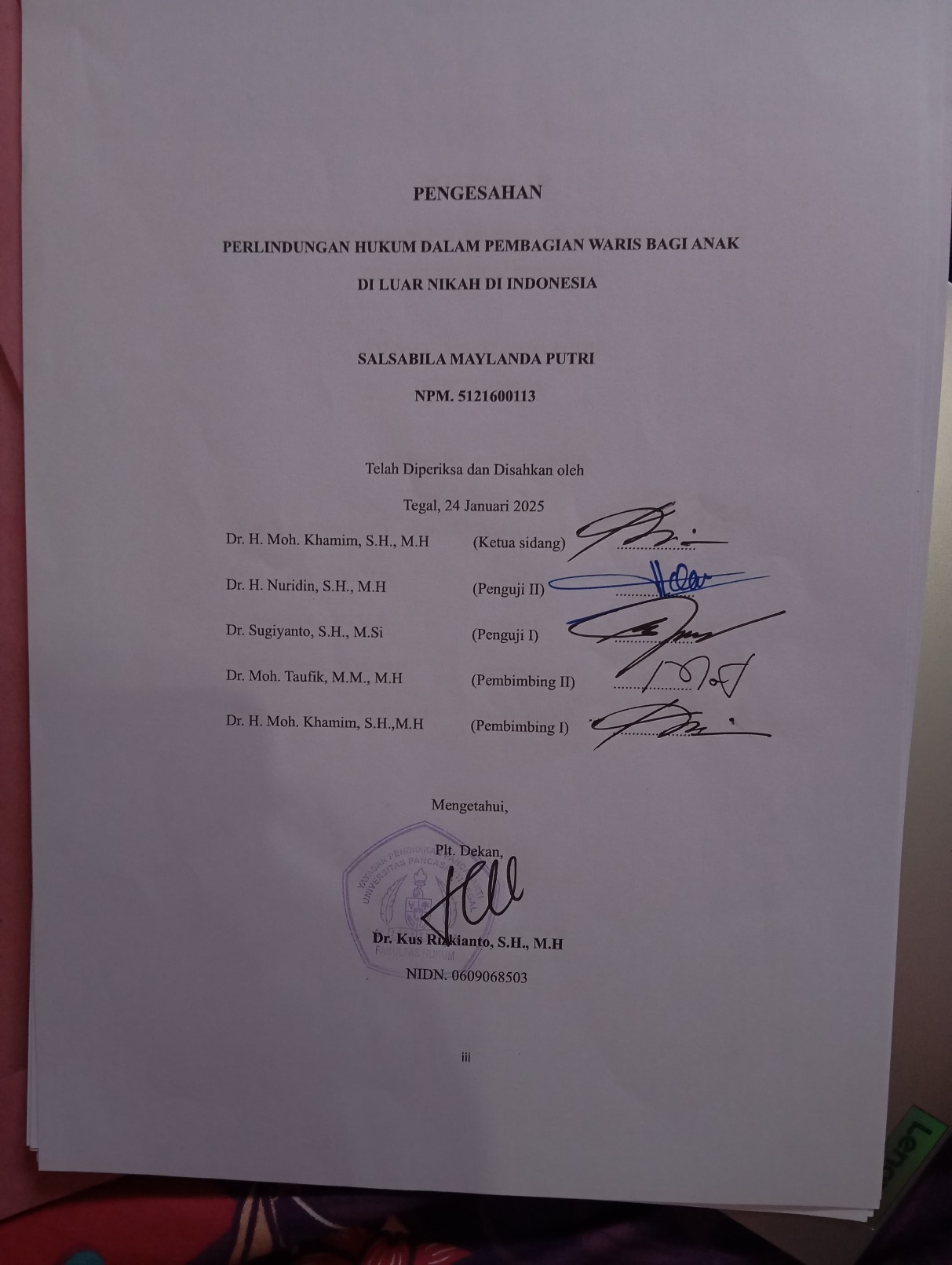
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

# **PERSETUJUAN PEMBIMBING**



# **PENGESAHAN**



# **PERNYATAAN**

****

# **ABSTRAK**

Hak anak dalam mendapat pengakuan dan perlindungan di mata hukum telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Amar ini telah memberikan angin segar untuk anak tidak sah dengan memberikan mereka akses yang lebih adil terhadap hak-hak sipil, termasuk hak waris, hak atas nafkah, dan hak untuk diakui sebagai bagian dari suatu keluarga. Makalah ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana putusan tersebut telah memperkuat perlindungan hukum bagi anak dan berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan bagi semua anak di bawah hukum. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa putusan ini menciptakan perubahan signifikan dalam hukum perdata Indonesia, meskipun menghadapi kendala dalam implementasinya. Masyarakat yang masih memegang teguh norma sosial konservatif sering kali menolak pengakuan hukum terhadap anak tidak sah. Selain itu, tantangan teknis, seperti verifikasi hubungan biologis melalui tes DNA yang mahal, serta kurangnya prosedur standar dalam pembuktian, memperumit pelaksanaan keputusan ini. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan kajian hukum sebagai landasan utamanya mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi serta landasan hukum yang relevan. terkait. Penelitian ini juga mengkaji kendala-kendala implementasi keputusan MK dalam praktiknya, baik di tingkat masyarakat, hukum, maupun administrasi. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap keberhasilan dan tantangan dalam implementasi putusan.

***Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Waris***

# **ABSTRACT**

*Children's rights to recognition and protection in the eyes of the law have evolved rapidly following the Constitutional Court's decision No. 46/PUU-VIII/2010. This ruling has provided a breath of fresh air for illegitimate children by giving them fairer access to civil rights, including inheritance rights, the right to maintenance, and the right to be recognized as part of a family. This paper will examine in depth how the ruling has strengthened legal protection for children and contributed to the realization of equality for all children under the law. The literature review shows that the ruling created significant changes in Indonesian civil law, although it faced obstacles in its implementation. Communities that still uphold conservative social norms often resist legal recognition of illegitimate children. In addition, technical challenges, such as the costly verification of biological relationships through DNA testing, as well as the lack of standardized procedures in evidence, complicate the implementation of this decision. This research adopts a normative approach with legal studies as its main foundation referring to the Constitutional Court decision as well as relevant legal grounds. related. It also examines the obstacles to the implementation of the Constitutional Court's decision in practice, both at the community, legal and administrative levels. The discussion in this study includes an analysis of the successes and challenges in implementing the decision.*

***Keyword: Children's Rights, Legal Protection, Constitutional Court Ruling***

# **PERSEMBAHAN**

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat yang luar biasa, memberikan kekuatan serta memberi kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir saya dengan baik. Segala perjuangan yang sudah saya lalui hingga titik ini saya persembahkan teruntuk orang orang yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini

1. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta Papah Karnadi dan Mamah Sunarti yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya
2. Kepada kakak-kakak saya, mba des, teteh, mba as terimakasih atas dukungannya secara moril maupun materiil, terimakasih atas nasehatnya dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa
3. Kepada teman-teman Turu Date (Caca, Else, Jinan, Siti, Abni, Syifa, Lusi, Meyra) yang telah bersama dari semester pertama sampai terakhir, terimakasih sudah membantu dan direpoti oleh penulis
4. Kepada teman-teman saya Upi dan Dede terimakasih sudah menemani, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis
5. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Salsabila Maylanda Putri yang telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, dan tidak menyerah menghadapi rintangan yang dilihat oleh orang luar gampang namun menurut penulis susah. Kamu hebat sasa.

# **MOTTO**

Hidup mengalir sesuai ketetapan Allah, karena sesungguhnya ‘Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya’

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

# **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasullulah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Waki Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1 yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 30 Januari 2025

Penulis

# **DAFTAR ISI**

[**JUDUL i**](#_Toc190137088)

[**PERSETUJUAN PEMBIMBING ii**](#_Toc190137089)

[**PENGESAHAN iii**](#_Toc190137090)

[**PERNYATAAN iii**](#_Toc190137091)

[**ABSTRAK v**](#_Toc190137092)

[**ABSTRACT vi**](#_Toc190137093)

[**PERSEMBAHAN vii**](#_Toc190137094)

[**MOTTO viii**](#_Toc190137095)

[**KATA PENGANTAR ix**](#_Toc190137096)

[**DAFTAR ISI xi**](#_Toc190137097)

[**BAB I 1**](#_Toc190137098)

[**PENDAHULUAN 1**](#_Toc190137099)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc190137100)

[B. Rumusan Masalah 8](#_Toc190137101)

[C. Tujuan Penelitian 8](#_Toc190137102)

[D. Urgensi Penelitian 8](#_Toc190137103)

[E. Tinjauan Pustaka 9](#_Toc190137104)

[F. Metode Penelitian 11](#_Toc190137105)

[G. Sistematika Penulisan 14](#_Toc190137106)

[**BAB II 17**](#_Toc190137107)

[**TINJAUAN PUSTAKA 17**](#_Toc190137108)

[A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan 17](#_Toc190137109)

[1. Pengertian Hak Waris 17](#_Toc190137110)

[3. Pembagian Waris dalam Hukum Adat 25](#_Toc190137111)

[4. Pembagian Waris dalam Hukum Perdata Indonesia 27](#_Toc190137112)

[5. Unsur-unsur Kewarisan 34](#_Toc190137113)

[B. Tinjauan Umum Perkawinan 35](#_Toc190137114)

[1. Pengertian Perkawinan 35](#_Toc190137115)

[2. Syarat dan Rukun Perkawinan 39](#_Toc190137116)

[3. Hubungan Orang Tua dengan Anak 41](#_Toc190137117)

[C. Tinjauan Umum Mengenai Anak Luar Kawin 45](#_Toc190137118)

[**BAB III 49**](#_Toc190137119)

[**HASIL DAN PEMBAHASAN 49**](#_Toc190137120)

[A. Sistem Hukum di Indonesia mengenai Hak Waris Anak Luar Kawin setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 49](#_Toc190137121)

[B. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 55](#_Toc190137122)

[**BAB IV 60**](#_Toc190137123)

[**PENUTUP 60**](#_Toc190137124)

[A. Simpulan 60](#_Toc190137125)

[B. Saran 61](#_Toc190137126)

[**DAFTAR PUSTAKA 63**](#_Toc190137127)

[**DAFTAR RIWAYAT HIDUP 70**](#_Toc190137128)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Perdebatan hukum, sosial, dan budaya di Indonesia dituntun oleh norma hukum yang relevan terhadap keturunan yang terlahir tanpa ikatan pernikahan yang tercatat. Ketentuan hukum yang mengatur status anak yang lahir di luar institusi pernikahan diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terutama Pasal 43(1), bahwa seorang anak berada dalam lingkup hubungan hukum perdata yang terbatas pada pihak ibu dan keluarganya. Berdasarkan ketentuan ini, hubungan antara keturunan dan pria (ayah) tidak didasarkan pada ikatan suci, tetapi bukti adanya keterkaitan kekerabatan antara anak dan pria yang disebut ayah. Anak yang terlahir di luar ikatan suci tidak bersalah karena tidak diinginkannya, dan harus diberikan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kerugian pada anak tersebut.[[1]](#footnote-1)

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki signifikansi penting dalam melindungi jaminan anak yang universal dan menekankan prinsip non-diskriminasi dengan menjamin hak-hak dasar anak terlepas dari status kelahirannya. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur pembagian waris, UU ini memberikan landasan hukum untuk perlindungan hak inheren anak, yakni hak pengakuan status, hak mendapatkan pemeliharaan, akademik, dan perlindungan sosial. Pasal 4 undang-undang ini menegaskan setiap individu muda berhak inheren untuk eksis, berevolusi, dan merealisasikan potensi dirinya secara utuh, serta terlibat aktif dalam lingkungan sosial tanpa mengalami perlakuan yang merendahkan atau pembedaan.

UU HAM No. 39 Tahun 1999 menyediakan kerangka hukum yang lebih luas untuk perlindungan hak-hak anak. Khususnya pada Pasal 52-66, UU tersebut mengatur menetapkan penjagaan khusus bagi anak dan terdapat mandat yang tegas bagi seluruh komponen masyarakat, mulai dari keluarga hingga negara, menyajikan jaminan yang paling sempurna bagi anak. Dalam konteks anak tidak sah, UU ini menegaskan prinsip persamaan hak dan perlindungan hukum tanpa membedakan asal-usul kelahiran. Meskipun tidak langsung mengatur masalah waris, pasal-pasal dalam UU ini membuka peluang penafsiran hukum yang lebih inklusif, yang dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam upaya memperoleh hak-hak perdata, termasuk potensi pembagian waris. Pasal 53 secara khusus menyatakan bahwa anak-anak dengan disabilitas tubuh dan jiwa memperoleh peluang yang seimbang untuk mencapai hak asasi mereka, sebuah penafsiran yang dapat diperluas untuk melindungi hak pada anak tidak sah.

Berdasarkan konteks masyarakat Indonesia yang majemuk secara hukum, permasalahan ini menjadi semakin kompleks. Selain hukum nasional, aturan syariat islam dan norma kebiasaan juga berperan dalam menentukan hak waris, dan setiap sistem hukum mempunyai pandangan berbeda mengenai kedudukan anak tidak sah. Berdasarkan fikih Islam, Anak yang ada tanpa ikatan sah tidak berhak atas hak-hak tertentu untuk mewarisi ayah kandungnya kecuali melalui hibah atau wasiat[[2]](#footnote-2). Hibah merupakan pemberian harta atau kekayaan kepada orang lain secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Wasiat merupakan pesan terakhir yang berisi keinginan pemilik harta untuk dibagikan kepada orang lain setelah ia meninggal dunia.

Pemerintah harus memberikan perlindungan preventif dan represif kepada anak tidak sah. Jika anak tidak sah memiliki hak keperdataan, mereka memiliki perlindungan hukum preventif. Ini berarti bahwa mereka dilindungi dari hak-hak normatif mereka, hak-hak inheren dan hak harta peninggalan dari ayah kandung mereka sesuai dengan undang-undang. Di sisi lain, perlindungan hukum represif mengacu pada kasus-kasus di mana pengadilan telah menetapkan posisi hukum yang rancu dari anak-anak yang tidak dilahirkan dalam ikatan perkawinan menimbulkan berbagai persoalan normatif lainnya.[[3]](#footnote-3)

Menurut Putusan MK ini, para pemohon Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan menyatakan pengaju yakni pihak yang langsung merasakan dampak hak konstitusionalnya dari penerapan UU Perkawinan, terutama terkait dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Hak konstitusional para pemohon mengalami pelanggaran hak-haknya yang dilindungi dalam UU Perkawinan. Menurut Pasal 28B ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, perkawinan yang dilakukan berdasarkan UU Perkawinan Pemohon 1 adalah sah, tetapi dihalangi oleh Pasal 2 UU Perkawinan, sehingga tidak sah secara hukum. Hasilnya, status hukum dipengaruhi oleh penerapan peraturan tersebut. Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan, buah hati yang terlahir dari perkawinan Penggugat 1 atau Penggugat 2 dianggap sebagai anak tidak sah.

Contoh kasus yang lain terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Dalam kasus tersebut, pewaris yang telah tiada memiliki tiga kali perkawinan, di mana anak dari perkawinan pertama merupakan anak tak sah, sementara buah hati dari pernikahan kedua adalah anak yang sah. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata, keturunan yang terlahir dari luar ikatan nikah yang diakui seharusnya mendapat bagian sepertiga dari jatah anak sah, tetapi putusan memberikan bagian yang sama kepada semua anak. Perbedaan ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dan interpretasi hukum terkait hak waris keturunan tidak sah, seiring dengan perkembangan nilai dalam masyarakat modern.

Putusan MK ini menjadi titik balik penting dalam memberikan payung hukum yang lebih luas bagi anak tidak sah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan anak dengan status tidak sah mempunyai keterkaitan perdata dengan ibunya dan ayah kandungnya, jika hal itu dapat dibuktikan secara hukum, misalnya dengan pemeriksaan DNA atau bukti yang diperbolehkan secara hukum. Putusan ini memberikan ruang bagi anak tidak sah untuk mendapatkan hak yang lebih adil dalam konteks hubungan keluarga, termasuk warisan dari bapak kandung. Putusan ini anak tidak sah layak mendapat pengakuan hukum, termasuk warisan dari bapaknya asalkan itu dapat dibuktikan melalui hubungan darah dengan bapak biologisnya berdasarkan bukti yang sah.[[4]](#footnote-4) Meskipun demikian, implementasi dari putusan ini tidak selalu mudah, karena masih banyak hambatan sosial dan budaya yang menghalangi pengakuan hukum tersebut.

Pasca putusan ini, proses implementasi kebijakan ini dihadapkan pada berbagai kendala teknis, terutama dalam hal pembuktian hubungan biologis. Meskipun uji DNA telah menjadi standar dalam membuktikan hubungan kekerabatan, namun penerapannya seringkali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk penolakan dari pihak yang diduga sebagai ayah. Putusan MK ini juga membantu diskusi lanjutan terkait perlunya revisi terhadap UU Perkawinan.[[5]](#footnote-5)

Tantangan dalam penerapan putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah norma-norma sosial yang kuat di masyarakat, terutama yang terkait dengan stigma negatif terhadap anak tidak sah. Banyak keluarga yang enggan mengakui anak tidak sah, bahkan setelah ada putusan hukum yang memungkinkan pengakuan tersebut. Ketakutan akan stigma sosial, terutama di lingkungan masyarakat yang sangat tradisional, menjadi hambatan utama bagi anak tidak sah untuk diakui oleh ayah biologisnya[[6]](#footnote-6). Dalam situasi ini, meskipun anak memiliki hak hukum, mereka tetap tidak dapat memanfaatkan hak tersebut karena tidak adanya pengakuan formal dari pihak keluarga.

Anak tidak sah yang tidak terakui tidak punya dasar hukum kuat untuk menuntut bagian warisan ayahnya. Ketentuan hukum yang kaku dan norma-norma sosial yang masih diskriminatif menyebabkan mereka sering kali diabaikan dalam pembagian waris. Ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam, di mana anak tidak sah ditempatkan pada posisi subordinat dalam hukum waris. Padahal, dari perspektif hak asasi manusia, setiap putra-putri harus mendapatkan perlindungan yang sama dan setara di mata hukum, termasuk dalam hal hak waris.

Sistem waris di Indonesia mempunyai hubungan erat dengan pluralisme hukum, syariat agama, adat, dan hukum perdata nasional saling bersinggungan. Dalam syariat agama, anak tidak sah dianggap tidak punya hak waris dari bapak kandungnya, kecuali jika ayah memberikan hibah atau wasiat kepada anak tersebut sebelum meninggal[[7]](#footnote-7). Namun, hukum adat di berbagai daerah mungkin berbeda-beda dalam memperlakukan anak tidak sah. Ada beberapa daerah yang memberikan ruang bagi anak tidak sah untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, meskipun biasanya dalam jumlah yang terbatas atau dalam bentuk hak-hak tertentu yang tidak sebanding dengan anak sah.

Konteks keberagaman hukum ini memperumit situasi anak tidak sah, sebab hak-haknya tidak diakui secara seragam di seluruh Indonesia. Di satu sisi terdapat usaha untuk menyuguhkan jaminan hukum yang lebih memadai melalui putusan Mahkamah Konstitusi, namun di sisi lain implementasinya bergantung pada bagaimana norma hukum adat dan agama diterapkan di masing-masing daerah. Keturunan tidak sah yang tinggal di daerah yang norma adatnya atau penafsiran hukum Islamnya ketat akan lebih sulit memperoleh hak waris dibandingkan anak yang tinggal di daerah yang norma adatnya lebih longgar.

Permasalahan pembagian warisan seringkali menimbulkan konflik keluarga yang serius, terutama pertikaian identitas keturunan yang tidak sah. Tidak adanya pengakuan resmi terhadap ayah kandung seringkali memicu konflik antar anggota keluarga mengenai hak waris. Dalam beberapa kasus, keluarga besar berusaha menolak klaim anak tidak sah atas harta warisan, meskipun secara biologis mereka adalah keturunan sah dari pewaris. Sengketa semacam ini tidak hanya memperumit proses pembagian waris, tetapi juga dapat memicu perpecahan dalam hubungan keluarga, yang sebenarnya dapat dihindari apabila terdapat ketentuan hukum yang lebih gamblang dan terbukti mengenai hak-hak tidak sah.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang lebih progresif dan inklusif membela kepentingan anak tidak sah, khususnya yang berkaitan dengan warisan. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan reformasi hukum yang lebih komprehensif yang tidak hanya mencakup pengakuan sipil atas anak tidak sah namun juga memperjelas hak waris mereka. Jaminan hukum yang ada saat ini masih belum memadai untuk menjamin anak tidak sah menerima bagian warisan yang adil. Peraturan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa anak tidak sah tidak lagi mengalami diskriminasi dalam pembagian warisan karena status kelahirannya.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum hak waris bagi anak di luar nikah, setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

## **Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji pengaturan hukum di Indonesia mengenai warisan anak tidak sah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini
2. Menelaah halangan-halangan yang menggagalkan upaya menjain hak anak tidak sah terkait dengan pembagian harta warisan

## **Urgensi Penelitian**

Penelitian tentang perlindungan hukum dan keadilan dalam pembagian harta peninggalan bagi anak tidak sah di Indonesia sangat penting dilakukan karena beberapa alasan utama. Ketidakjelasan dalam hukum mengenai hak waris bagi anak tidak sah. Meskipun Putusan MK ini memberi peluang bagi anak tidak sah untuk punya keterkaitan hukum dengan bapak kandung, penerapan keputusan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pelaksanaannya dan penerimaan masyarakat terhadapnya.

Berdasarkan data di lapangan, anak tidak sah sering kali tidak diakui atau tidak mendapatkan hak waris yang adil. Situasi ini semakin memperburuk posisi mereka yang rentan di masyarakat. Meskipun sudah ada dasar hukum yang memungkinkan mereka mendapatkan hak-hak tertentu, banyak anak tidak sah yang tetap tidak diakui dalam pembagian harta warisan, terutama karena faktor sosial dan budaya yang masih kuat menolak status mereka. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan bagi mereka dan membuat mereka sulit mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

## **Tinjauan Pustaka**

Farhan Asyhadi dalam tulisannya yang berjudul *“Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan,”* yang telah membahas mengenai bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari hubungan seperti perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan dapat mengakses hak-hak sipil mereka. Namun, putusan ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak berlaku bagi anak hasil perzinaan, sehingga memberikan batasan yang jelas dalam konteks perlindungan anak. Perbedaannya, jika Farhan fokus pada makna anak tidak sah dalam putusan MK ini, penulis lebih ke bagaimana sistem hukum dalam mengatur hak-hak waris bagi anak tidak sah.

Eunike Loist Hutasoit dkk. dalam tulisannya yang berjudul *“Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam,”* yang dalam tulisannya membahas mengenai perbandingan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan Arah yang diambil Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dibandingkan dengan hak anak tidak sah. Dalam tulisan ini juga membahas mengenai tantangan dalam implementasi dari Keputusan MK tersebut. Tulisan tersebut memiliki kesamaan dengan tulisan penulis yang dimana membahas mengenai implementasi dari Keputusan MK yang masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedannya, jika Eunike Loist Hutasoit dkk. fokus pada perbandingan antara putusan MK tersebut dengan syariat agama, penulis berfokus pada putusan MK ini dan tantangan yang dihadapi.

Robert N.Warong dan Grace Y. Bawole dalam tulisannya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010,”* dalam tulisannya menjelaskan jaminan terhadap anak tidak sah pasca Putusan MK ini bahwa relasi hukum orang tua dan anak, seharusnya berlaku universal, tanpa terkecuali “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Tujuan putusan tersebut adalah melindungi anak luar kawin. Tulisan tersebut memiliki kesamaan dengan tulisan penulis dalam mengobservasi putusan Mahkamah Konstitusi ini. Perbedaannya, penulis membahas tantangan yang masih dihadapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Ketiga jurnal tersebut membahas topik yang sama yaitu mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi ini, tetapi inti bahasan masing-masing jurnal berbeda, yang dimana Farhan Asyhadi lebih berfokus pada definisi dan batasan siapa yang dianggap sebagai status hukum anak tidak sah berdasarkan putusan lembaga peradilan tertinggi negara, MK. Eunike Loist Hutasoit dkk. membandingkan pendekatan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan hukum islam yang Dimana fokus utama adalah pada perbedaan pendekatan dan tantangan dalam harmonisasi antara hukum nasional dan agma. Robert N.Warong dan Grace Y. Bawole menitikberatkan pada jaminan hukum anak tidak sah setelah putusan MK, khususnya pada ikatan hukum sipil dengan kedua orangtua kandung, yang Dimana fokus utamanya adalah memastikan jaminan hukum yang optimal bagi anak tidak sah.

## **Metode Penelitian**

1. **Jenis Penelitian**

Fokus penelitian ini terpusat pada eksplorasi literatur yang relevan yaitu penelitian kepustakaan, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan sintesis pengetahuan dari berbagai kajian pustaka atau data sekunder. Penelitian kepustakaan umumnya dilakukan tanpa perlu terjun langsung ke lapangan, karena informasi yang dibutuhkan sudah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis yang relevan. Dalam konteks penelitian ini. Data sekunder mendominasi sebagai sumber data yang dimanfaatkan yang terdiri dari berbagai dokumen regulasi terkait dengan topik yang diangkat.

Data sekunder pada studi ini diklasifikasikan ke dua kelompok pokok, yakni sumber hukum utama dan sumber hukum tambahan. Dokumen peraturan primer adalah dokumen hukum yang langsung mengikat menurut ketentuan undang-undang. Contoh sumber hukum utama yakni UU, peraturan pemerintah, perintah eksekutif, dan berbagai dokumen hukum lainnya yang diakui secara formal oleh sistem hukum.

Sumber hukum sekunder berperan penting dalam pembentukan yurisprudensi dan dinamika hukum progresif. Bahan hukum sekunder ini mencakup berbagai literatur yang menjelaskan peraturan-peraturan hukum, penelitian ini mengacu pada beragam sumber, mulai dari regulasi yang masih dalam tahap perumusan hingga karya-karya akademik yang telah teruji oleh para ahli di bidangnya. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, namun berfungsi sebagai bahan yang mendukung pemahaman dan analisis hukum yang lebih mendalam.

1. **Pendekatan Penelitian**

Kajian ini mengadopsi perspektif normatif sebagai landasan metodologinya, yakni metode yang menelaah permasalahan hukum berdasarkan sudut pandang legal-formal atau normatif. Dalam pendekatan ini, analisis memfokuskan pada bagian aturan-aturan hukum yang berlaku diterapkan dalam kasus atau situasi tertentu, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Pendekatan ini meninjau permasalahan hukum dari segi apakah sesuatu tersebut diperbolehkan atau dilarang menurut Undang-Undang. Hal ini dilakukan melalui kajian terhadap ketentuan hukum yang termaktub dalam perangkat perundangan dan instrument hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

1. **Data Penelitian**

Kajian ini mengandalkan data sekunder, yakni informasi yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pihak yang berbeda, melainkan melalui bahan-bahan yang sudah ada dari sumber-sumbar kepustakaan. Data sekunder ini mencakupi informasi yang telah dikumpulkan, dipublikasikan, atau di sediakan oleh pihak lain, seperti dokumen-dokumen hukum, buku, jurnal akademik, dan artikel lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

Penggunaan data sekunder memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengakses informasi yang sudah terdokumentasi dan terverifikasi, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis tanpa harus melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Melalui bahan-bahan Pustaka ini, peneliti dapat mengeksplor berbagai sumber tertulis terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dengan demikian, data sekunder menjadi dasar utama dalam penelitian ini untuk mengembangkan argument, teori, dan Kesimpulan yang didasarkan pada informasi yang sudah ada.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan informasi pada studi ini melibatkan sumber data sekunder, yang didapatkan melalui penelusuran kepustakaan. Hal ini dilakukan karena teknik pengumpulan informasi pada penelitian ini melibatkan sumber data kedua, seperti dokumen-dokumen hukum dan dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya,

Metode ini dilakukan dengan mengakses berbagai referensi tertulis yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, makalah hukum, dan peraturan perundang-undangan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap dan mendalam terkait permasalahan hukum yang sedang dikaji. Metode ini memfasilitasi investigasi mendalam terhadap naskah-naskah hukum yang tersedia tanpa harus mengumpulkan data utama atau yang biasa disebut sebagai data primer berasal dari lapangan atau responden.

1. **Metode Analisis Data**

Pendekatan pengolahan data yang diterapkan dalam kajian ini ialah analisis data kualitatif. Langkah pertama ketika menganalisis data adalah mereduksinya. Itu berarti merangkum data, memahaminya, mnggali inti permasalahan, mengidentifikasi benang merah, dan menyaring informasi yang tidak berkaitan. Data akan penulis transformasikan menjadi representasi visual yang informatif melalui matriks relasi, pemahaman konsep menjadi lebih intuitif. Langkah terakhir yaitu penarikan Kesimpulan/verifikasi.

## **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merancang tata urutan penyajian yang terdiri dari:

Bab 1 yaitu pendahuluan, disusun oleh penulis untuk memberikan latar belakang masalah. Bab ini membahas pentingnya perlindungan hukum dan keadilan dalam pembagian waris anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan di Indonesia, seperti yang diuraikan dalam rumusan masalah sebelumnya. Namun, menjawab rumusan masalah adalah tujuan dari penelitian ini. Pada bab ini, penulis menjelaskan bagaimana penelitian ini bermanfaat bagi kedua penulis dan pembaca. Selanjutnya, penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terakhir, penulis menjelaskan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini dan prosedur penulisan yang akan dibahas secara sistematis.

Bab II yaitu Tinjauan Konseptual. penulis akan merumuskan dan menguraikan secara rinciprinsip hukum yang menjadi pondasi filsafat hukum dengan penelitian yang penulis dapatkan melalui memerhatikan variabel penelitian yang dimuat dalam judul. Bab kedua ini menawarkan analisis menyeluruh yang mencakup kajian mendalam mengenai hukum perpindahan harta setelah seseorang meninggal dunia, regulasi hubungan perkawinan, serta kedudukan hukum anak tidak sah.

Bab III merupakan hasil kajian & diskusi. Penulis akan menguraikan dan menjawab sebuah permasalaha berdasarkan telaah komprehensif terhadap berbagai referensi yang ada. Masalah utama yang ditelahtinasi dalam kajian ini adalah tentang cara sistem perundangan di Indonesia menetapkan kepentingan pewaris untuk keturunan bukan hasil perkawinan resmi, khususnya adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak tidak sah nikah terkait pembagian waris di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bab IV yaitu penutup. Penulis menyuguhkan rangkuman komprehensif dari hasil penelitian, sekaligus memberikan jawaban tegas atas pertanyaan penelitian.

# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **Tinjauan Umum Tentang Kewarisan**

### **Pengertian Hak Waris**

Pengaturan tentang pemindahan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya menjadi fokus utama dalam hukum waris. Bidang hukum ini juga mencakup dampak hukum yang muncul dari proses pengalihan tersebut. Semua harta untuk pewaris yakni baik aktiva atau pasiva, beralih kepemilikannya kepada ahli waris. Dalam konteks ini, istilah "boedel" digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kekayaan yang menjadi milik bersama pewaris. Dengan kata lain, harta warisan mencakup segala sesuatu harta benda yang dimiliki seseorang pada saat kematiannya dan secara hukum dialihkan kepada pihak-pihak yang berhak atasnya.[[8]](#footnote-8)

Kata "waris" merujuk pada pihak yang secara sah memiliki hak untuk menerima harta tinggalan, yang dikenal sebagai ahli waris. Proses ini berlangsung secara otomatis, di mana kematian seseorang menjadi penentu utama dalam peralihan hak kepemilikan, tidak terikat oleh urutan ajal dalam suatu keluarga. Waris yakni proses di mana harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup. Pemindahan harta warisan ini terjadi melalui mekanisme yang memberikan hak kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara otomatis, kepemilikan harta warisan berpindah seiring terjadinya kematian, tanpa dapat diprediksi siapa yang meninggal lebih dahulu. Hak dan kewajiban yang melekat pada si mayit juga secara otomatis beralih. Dalam konteks ini, hukum waris Islam berperan penting dalam mengatur bagaimana harta tersebut didistribusikan kepada ahli waris yang berhak.[[9]](#footnote-9)

Hukum waris Indonesia masih bersifat plural dengan mempertimbangkan keberagaman budaya, agama, adat istiadat sosial, dan struktur keluarga dinamis yang tumbuh subur dan berakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia. Artikel ini menguraikan hukum waris Barat yang dimuat dalam KUH Perdata II (Berkaitan dengan Benda). Hukum waris tidak semata-mata mencakup dimensi hukum mengenai kekayaan, melainkan juga meliputi berbagai dimensi. Aturan mengenai pewarisan secara esensial adalah subdisiplin dari hukum kekayaan.[[10]](#footnote-10)

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya penulis sajikan sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: "Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Menurut Soepomo, "Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya." Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "Azas-azas dan Susunan Hukum Adat" yang dialihbahasakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."

“Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya sesorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga."[[11]](#footnote-11) Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa" Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, warisan memiliki batasan-batasan tertentu yang mencakup tiga elemen utama. Pertama, adanya seseorang yang meninggalkan warisan atau disebut *Erflater*, yaitu individu yang meninggal dunia dan menjadi sumber dari harta peninggalan tersebut. Kedua, keberadaan satu atau beberapa ahli waris, yang dikenal sebagai *Erfenaam*, yaitu pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh *Erflater*. Ketiga, harta warisan itu sendiri, yang disebut *nalaten schap*, berupa kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan secara otomatis berpindah kepada ahli waris..

1. **Pembagian Waris dalam Hukum Islam**

Hukum waris adalah bagian tak terpisahkan dari hukum Allah dan menempati posisi yang amat vital di dalamnya. Ayat Alquran mengatur karena masalah genetik terjadi pada semua orang. Apalagi regulasi perpindahan hartamerupakan suatu harta benda yang pasti akan dialami oleh setiap orang jika tidak melakukan upaya pencegahan. Jika hukum waris tidak diterapkan secara menyeluruh, hal itu dapat menyebabkan konflik keluarga dan bahkan pertumpahan darah. Ini terjadi karena kebiasaan dan hukum adat yang kuat, sehingga penundaan pembagian harta peninggalan pewaris dapat berakibat fatal bagi ahli waris atau keluarga mereka.

Berdasarkan pandangan syariat, ketentuan tentang pembagian warisan mendapatkan perhatian yang besar mengenai pembagian perkebunan karena sering kali berakhir dampak buruk. Segmen warisan yang menjadi hak para penerus juga diuraikan secara mendetail dalam Al-Qur'an. Ilmu faraid adalah disiplin keilmuan yang mengkhususkan diri pada pembagian harta warisan. Kata "faraid," yang merupakan bentuk jamak dari "faridah," bersumber dari istilah "fardu" yang mengacu pada bagian yang telah ditetapkan dengan jelas.[[12]](#footnote-12)

Menurut Pasal 171(a) Kompilasi Hukum Islam, pewarisan menetapkan ketentuan mengenai transisi kepemilikan atas aset warisan (tirqa) di antara para ahli waris, serta menentukan pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris dan proporsi hak masing-masing individu. Dalam konteks yang lebih luas, pewarisan dapat dipahami sebagai pengalihan hak kepemilikan dari individu yang telah wafat kepada penerus yang masih hidup.

Tata cara pewarisan menurut syariat Islam yakni komponen dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan menjadi hak mutlak bagi mereka yang berhak menerima warisan secara proporsional berdasakan Al-Quran dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam diantaranya seperti tersebut dibawah ini : [[13]](#footnote-13)

1. Warisan adalah pengaturan hukum. Pewaris tidak dapat menghalangi ahli waris untuk melaksanakan hak warisnya, dan para ahli waris berhak memperoleh harta peninggalan tanpa memerlukan adanya pengakuan penerimaan secara sukarela atas putusan majelis hakim. Namun ahli waris tidak wajib melunasi kewajiban finansial yang ditinggalkan oleh individu yang telah berpulang (pewaris).

2. Warisan yang terbatasi dalam lingkup keluarga, disebabkan oleh ikatan pernikahan atau karena hubungan darah/keturunan yang diakui. Anggota keluarga dekat yang memiliki hubungan jauh dengan almarhum (ahli waris) diprioritaskan, dan keluarga yang memiliki hubungan lemah dengan almarhum (ahli waris) diprioritaskan di atas keluarga yang hubungan lemahnya. Misalnya, diutamakan ayah ketimbang kakek, dan saudara laki-laki lebih diutamakan dibandingkan saudara sedarah dari pihak ayah.

3. Hukum waris dalam Islam cenderung mendistribusikan harta peninggalan kepada sebanyak mungkin dalam proporsi yang tetap. Apabila penerus harta mencakup bapak, ibu, pasangan, serta anak, maka setiap individu tersebut berhak memperoleh bagian dari warisan.

4. Hukum waris dalam Islam tidak membedakan hak waris bagi anak. Para orang tua, bayi, serta anak yang baru saja dilahirkan semuanya berhak menerima harta peninggalan dari orang tuanya. Namun perbedaan besarnya bagian tersebut diimbangi dengan perbedaan besarnya beban tugas yang harus dilaksanakan dalam keluarga. Anak lelaki yang menanggung beban tanggung jawab nafkah keluarga memiliki hak yang lebih signifikan dibandingkan dengan anak perempuan yang tidak dibebani tanggung jawab nafkah keluarga.

5. Hukum waris dalam Islam mengkategorikan besaran bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari, di samping mempertimbangkan kedekatan atau jaraknya hubungan mereka dengan mayit. Pembagian harta yang telah disepakati adalah dua per tiga, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, serta seperdelapan. Kewajiban melaksanakan ketentuan pembagian waris sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 13 merupakan cerminan dari ketaatan umat Islam terhadap hukum Allah. Hal ini menjadikannya sebagai ciri khas yang membedakan hukum waris Islam dengan sistem waris lainnya.

Terkait bagian-bagian warisan dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Menurut Al-Mawarits fisy syarii'atil Islaamiyyah 'Alaa dhau' al-kitaab wa sunnah karya Muhammad Ali ash-Shabuni yang diterjemahkan A M Basalamah, berdasarkan surah An Nisa ayat 11 maka pembagian warisan menurut Islam dapat disimpulkan persentase pembagiannya terdiri dari 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.

1. Ahli waris yang mendapat bagian 1/2 meliputi sekelompok pria dan empat wanita. Mereka termasuk pasangan hidup, putri, keturunan perempuan, keturunan perempuan dari garis anak lelaki, serta saudari dari ayah.

2. Pembagian warisan menurut Islam dengan bagian 1/4 berhak didapatkan oleh pasangan sah dari pewaris.

3. Bagian 1/8 akan diberikan kepada istri. Seorang istri yang mewarisi harta suaminya, tanpa memandang apakah dia mempunyai anak atau cucu dalam kandungannya, atau anak dan cucu dari wanita lain.

4. Selanjutnya 2/3. Bagian sebesar ini diberikan kepada hak waris yakni empat perempuan sebagai ahli waris, yakni putri kandung dan saudara perempuan seayah.

5. Ahli waris yang mendapat 1/3 warisan adalah Ibunda beserta dua putra-putri kandungnya.

6. Sementara itu, bagian 1/6 berhak atas ayah, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan ayah, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan ibu.[[14]](#footnote-14)

### **Pembagian Waris dalam Hukum Adat**

Sistem waris Indonesia saat ini menunjukkan keberagaman yang signifikan dan dinamis. Keberagaman yang ada di Indonesia, membuat lahirnya beberapa jenis hukum waris yang berlaku. Indonesia menerapkan hukum waris Islam, hukum waris Barat berdasarkan hukum perdata, dan hukum waris adat. Faktanya, sistem hukum waris adat pun menunjukkan keberagaman yang signifikan, dimana dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang masih kental hidup di dalam masyarakat Indonesia. Sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)

Pertama, Sistem Patrilineal, hubungan kekeluargaan dalam sistem ini adalah berdasarkan silsilah paternal atau genealogi garis ayah. Daerah yang menganut sistem ini adalah Tanah Gayo, Batak, Irian Jaya, Timor dan Bali;

Kedua, Sistem Matrilineal, hubungan kekeluargaan dalam sistem ini adalah berdasarkan sistem kekerabatan yang menelusuri silsilah melalui garis maternal atau ibu, lazim dianut oleh masyarakat Minangkabau;

Ketiga, Sistem orang tua, hubungan kekeluargaan dalam sistem ini adalah berdasarkan garis keturunan keduanya, yaitu dari pihak laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Daerah yang menganut sistem ini adalah masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, Ternate, Lombok, dan lain sebagainya.

Keragaman sistem pewarisan, yang dapat berupa patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral, menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa waris, terutama terkait dengan pembagian harta benda, seperti tanah. Pemahaman yang komprehensif terhadap sistem pewarisan yang berlaku sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara para ahli waris. Ketentuan adat yang berbeda-beda sering kita jumpai pembagian warisan berupa tanah diberikan kepada perbedaan perlakuan terhadap ahli waris berdasarkan jenis kelamin menyebabkan pembagian harta warisan yang tidak merata. Harta warisan merupakan hal yang sangat sensitif, dimana dengan mudahnya para ahli waris mengalami perpecahan dalam keluarga.

Salah satu alasan perselisihan para ahli waris adalah pembagian warisan yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya. Akibatnya, beberapa keluarga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang diharapkan.[[16]](#footnote-16) Dalam posisi seperti ini, tanggung jawab utama seorang notaris adalah memahami peran mereka dalam menangani masalah di atas dengan menjaga hukum adat wilayah setempat, yang memiliki prinsip kekeluargaan yang kuat.

### **Pembagian Waris dalam Hukum Perdata Indonesia**

Pembagian harta waris merupakan suatu proses hukum yang amat penting bagi warga indonesia. Hal ini menjadi semakin rumit ketika turut terlibatnya hukum waris perdata, yang dimana pembagian waris menurut hukum perdata Indonesia yakni bentuk regulasi hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan bagi penduduk Indonesia, khususnya mereka yang menganut kepercayaan non-Islam.

Regulasi warisan perdata ialah norma yang mengatur tentang distribusi kekayaan individu yang telah berpulang kepada ahli waris atau kerabat yang berhak. Meskipun hukum waris perdata memiliki peranan yang krusial dalam ranah hukum di Indonesia, pemahaman mengenai ketentuan ini masih minim di kalangan masyarakat.

Tindakan ini berpotensi memicu perselisihan apabila pelaksanaan hukum warisnya tidak sejalan. Hukum waris perdata mempunyai berbagai unsur seperti ahli waris, ahli waris, harta warisan, dan lain-lain. Ahli waris menurut hukum perdata dibagi menjadi empat kelompok, terutama memperhatikan hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Pembagian harta warisan menurut hukum perdata, golongan pertama mempunyai prioritas sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris. Perlu diketahui bahwa dalam hukum waris perdata, tidak ada perbedaan besaran harta warisan antara laki-laki dan perempuan, serta hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dianggap setara.

Hukum perdata mengatur dua macam ahli waris, yakni pewaris sah yang ditentukan oleh ikatan perkawinan dan kekerabatan, serta mereka yang telah ditunjuk dalam wasiat. Ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan darah diatur dalam KUHPerdata, sementara ahli waris berdasarkan surat wasiat diatur dalam pasal 874 KUHPerdata.

Golongan pertama ahli waris, seperti suami istri, anak-anak beserta keturunannya, Kedua gender, baik pria ataupun wanita, secara inheren memiliki hak yang setara dalam membagi harta warisan menurut hukum perdata. Kelompok kedua meliputi orang tua dan saudara kandung pewaris, dan kelompok ketiga meliputi kakek nenek dan nenek moyang berikutnya. Golongan keempat meliputi anggota keluarga agunan dan saudara lainnya sampai dengan derajat keenam.

Bentuk wasiat bagi ahli waris berdasarkan wasiat bermacam-macam wasiat yang dicatat tangan dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris sendiri, surat wasiat umum yang dibuat oleh ahli waris di hadapan notaris, dan surat wasiat rahasia yang dibuat dan diserahkan secara pribadi kepada notaris oleh ahli waris.

Sangat krusial untuk diperhatikan bahwa ketentuan hukum waris sipil memberikan jaminan kepada perempuan agar tidak terjerumus dalam diskriminasi dan memiliki hak atas warisan dengan porsi yang setara dengan laki-laki. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia pada pasal 17 menegaskan bahwa setiap individu, tanpa adanya diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dalam perkara sipil, termasuk dalam konteks pembagian harta warisan. Artinya, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pembagian warisan berdasarkan hukum perdata, guna mencapai keadilan dan kesetaraan.

Apabila ahli waris wanita menghadapi perlakuan tidak adil dalam distribusi harta warisan, mereka berhak untuk mengajukan tuntutan demi memastikan bahwa mereka memperoleh warisan dengan proporsi yang setara dengan pria[[17]](#footnote-17). Ini merupakan langkah krusial dalam melindungi hak-hak perempuan di dalam kerangka hukum waris sipil.

Pembagian harta waris menurut KUHPerdata mengatur empat golongan ahli waris yang mempunyai hak atas harta benda yang ditinggalkan oleh seorang ahli waris. Jika golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mempunyai hak mewaris.

. Berikut adalah pembagian yang telah ditetapkan untuk masing-masing golongan:

* golongan pertama, terdiri atas suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anaknya yang tidak sah, dan keturunannya. Setiap orang menerima bagian yang sama
* golongan kedua terdiri dari ayah, ibu, saudara kandung, dan keturunan saudara kandung. Baik ayah maupun ibu dapat menerima kurang dari seperempat dari seluruh harta warisan.
* golongan ketiga mencakup moyang-moyang langsung dalam silsilah keturunan. Pembagian harta waris harus dilakukan dengan menerapkan sistem kloving, dimana setengah bagian diperuntukkan untuk sanak saudara dari garis bapak dan setengahnya untuk sanak saudara dari garis ibu.
* golongan Keempat mencakup kerabat jauh hingga tingkat kekerabatan keenam, baik dari garis keturunan langsung maupun tidak langsung. Cara pembagiannya juga melibatkan sistem kloving, dimana setengah bagian untuk garis bapak atau garis ibu.

Hukum perdata juga mengatur kriteria orang-orang yang tidak dapat menerima warisan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang berhak menerima warisan dibagi menjadi empat golongan: Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini tidak akan mendapatkan warisan ketika membagi harta warisan berdasarkan hukum perdata. Kategori-kategori ini mencakup:

* Orang yang telah dijatuhi sanksi hukum atas tindakan mengakhiri nyawa atau percobaan untuk mengakhiri nyawa pihak yang berhak atas warisan.
* Orang yang telah divonis bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik dan laporan palsu terhadap ahli waris terkait pelanggaran hukum yang dikenai sanksi kurungan minimal lima tahun.
* Orang yang dengan paksaan fisik menghalangi atau membatasi kehendak pewaris untuk menyusun atau membatalkan wasiat.
* Orang yang telah melakukan tindak pidana penggelapan, perusakan, atau pemalsuan terhadap surat wasiat.
* Jika mereka yang termasuk dalam kategori ini mengelola sebagian atau seluruh harta warisan dan berperan sebagai ahli waris. Mereka wajib mengembalikan segala sesuatu yang dikuasainya, termasuk buah-buahan yang mereka nikmati dari harta warisannya.

Regulasi perwarisan dalam hukum perdata berperan sentral dalam tatanan sosial Indonesia. Berlandaskan pada norma hukum yang tegas, distribusi aset warisan menurut hukum perdata menyajikan panduan yang kokoh untuk mencegah perselisihan dalam keluarga serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak para ahli waris[[18]](#footnote-18). Memahami karakteristik hukum waris perdata, kesetaraan hak antara pria dan wanita dalam ketentuan ini, serta ketentuan dan pembagian warisan yang ditentukan adalah hal yang sangat krusial.

Larangan bagi individu-individu yang tidak layak menerima harta warisan juga merupakan aspek krusial dalam ketentuan hukum waris sipil. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan proses distribusi harta warisan dan memastikan bahwa hanya mereka yang berhak, sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dapat menerimanya.

Hukum waris perdata adalah salah satu bentuk hukum yang dapat membantu mempertahankan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Ini juga mencerminkan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dalam konteks warisan, yang telah dikukuhkan dalam perundang-undangan mengenai hak-hak asasi. Upaya-upaya ini merupakan batu loncatan menuju masyarakat yang lebih adil, di mana setiap jiwa memiliki hak yang setara memiliki haknya dalam pembagian harta warisan.

Sistem hukum Indonesia mengenai pewarisan anak luar nikah saat ini sedang mengalami perubahan. Kemungkinan untuk itu diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa apabila kelahiran seorang anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik, maka hal itu ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Lebih lanjut, Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa hubungan antara anak dengan ayah tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan perkawinan saja, tetapi juga dapat didasarkan pada bukti adanya hubungan darah antara anak dan ayah. Oleh karena itu, anak yang terlahir wajib memperoleh pengayoman hukum apapun formalitas dan pengurusan perkawinan. Apabila tidak demikian maka anak tidak sah akan menjadi mangsa, meskipun anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya terjadi tanpa kehendak dirinya.

Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada sebelum berlakunya UUD 1945 tetap berlaku selama belum diubah atau digantikan oleh peraturan yang baru. Prinsip ini memberikan kesinambungan dalam sistem hukum Indonesia, terutama di tengah pluralisme hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris. Namun, asas lex posteriori derogat legi priori (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama) juga menjadi prinsip penting dalam penerapan hukum, terutama ketika terjadi konflik antara aturan lama dan aturan baru.

Pembagian waris bagi anak di luar nikah, peraturan yang berlaku sebelumnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap memiliki kedudukan hukum. KUHPerdata mengatur bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hak waris dari ibu biologisnya, sedangkan hukum Islam membatasi hubungan nasab dan waris hanya pada ibu kandung dan keluarga ibunya. Kedua aturan ini tetap berlaku karena diakui dalam kerangka Pasal 2 Aturan Peralihan.

Perkembangan hukum di Indonesia memperlihatkan penerapan asas lex posteriori derogat legi priori dalam beberapa aspek. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, termasuk hak atas nafkah, kasih sayang, dan kemungkinan hak waris. Putusan MK ini, sebagai produk hukum yang lebih baru dan bersifat konstitusional, pada dasarnya mengesampingkan atau melengkapi aturan sebelumnya dalam KUHPerdata maupun KHI, sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.

Asas lex posteriori derogat legi priori juga mencerminkan bagaimana sistem hukum Indonesia beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai keadilan. Dalam kasus waris anak di luar nikah, Putusan MK berusaha mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat modern yang tidak sepenuhnya diatur oleh aturan lama. Namun, pengakuan terhadap asas ini tidak menghapus aturan sebelumnya secara otomatis. Aturan lama tetap berlaku untuk situasi yang tidak bertentangan atau belum diatur oleh aturan baru, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945.

### **Unsur-unsur Kewarisan**

Unsur-unsur dalam hukum kewarisan mencakup beberapa elemen penting. Pertama, ahli waris merujuk pada orang yang meninggal dunia atau pihak yang mewariskan harta benda, di mana harta tersebut beserta kewajiban atau utang yang dimiliki biasanya dialihkan kepada pihak terkait. Kedua, pewaris yakni individu penerima harta benda dan memiliki hak hukum untuk memperoleh harta benda maupun kewajiban atau utang yang ditinggalkan oleh pihak yang mewariskan. Ketiga, warisan mencakup semua yang diwariskan kepada pewaris, seperti rumah, mobil, dan uang, maupun tanggung jawab, termasuk utang.[[19]](#footnote-19)

## **Tinjauan Umum Perkawinan**

### **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah institusi sosial dan legal yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi moral, spiritual, maupun hukum. Secara etimologis, konsep perkawinan berlandaskan pada praktik 'kawin' yang secara linguistik diartikan sebagai proses penyatuan dua individu berbeda jenis kelamin untuk membentuk sebuah keluarga, yang melibatkan aspek biologis reproduksi. Dalam bahasa Arab, istilah perkawinan dikenal dengan sebutan “an-nikah” Yang bermakna mengumpulkan, saling menyisipkan, serta berhubungan intim. Istilah ini memiliki makna yang mendalam karena mencerminkan penyatuan dua insan dalam hubungan resmi menurut ajaran keagamaan serta peraturan hukum. Menurut Sayid Sabiq, seorang ulama besar, perkawinan adalah sunnatullah, ketetapan Tuhan yang berlaku tidak terbatas pada manusia, fenomena ini juga berlaku secara universal bagi seluruh makhluk hidup. Perkawinan bukan hanya dipahami sebagai hubungan biologis, melaikan sebagai upaya menciptakan keturunan, melanjutkan generasi, dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Definisi perkawinan juga dapat ditemukan dalam KBBI, yang mengartikan perkawinan sebagai urusan atau perihal kawin, yang melibatkan pertemuan antara individu berbeda jenis kelamin secara seksual, serta merujuk pada usaha membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Berdasarkan regulasi hukum di Indonesia, definisi formal tentang perkawinan dijelaskan dalam Regulasi perkawinan sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengukuhkan perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang dilandasi kasih sayang mendalam, dengan maksud untuk mewujudkan keluarga seimbang dan lestari dalam naungan nilai-nilai ketuhanan. Definisi ini mencerminkan bahwa ikatan perkawinan bukan sekadar hubungan fisik, tetapi juga mencakup ikatan emosional dan spiritual yang mendalam, yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan dan moralitas.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sah dan diakui negara, yang berorientasi pada penciptaan ikatan keluarga yang harmoni dan langgeng. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) undang-undang yang sama menegaskan bahwa sahnya perkawinan itu bergantung pada kelengkapan tata cara keagamaan yang dijalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing pasangan. Ini berarti bahwa setiap agama memiliki peran penting dalam menentukan validitas suatu perkawinan. Namun, legalitas di mata agama saja belum cukup, karena Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pencatatan ini menjadi langkah krusial dalam memberikan legitimasi hukum terhadap perkawinan dan memastikan hak-hak legal pasangan suami istri dan keturunan mereka yang sah telah memperoleh pengakuan resmi.

Tujuan utama dari ikatan perkawinan sebagaimana termaktub dalam regulasi negara, agar terjalin harmoni dalam relasi suami istri, di mana keduanya dapat saling melengkapi dan mendukung. Pada kehidupan berumah tangga, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun keluarga yang sejahtera, baik secara spiritual maupun material. Kehadiran anak dalam perkawinan juga dianggap sebagai anugerah yang melengkapi kebahagiaan keluarga dan menjadi penerus garis keturunan. Namun, dalam realitas sosial, ketidakabsahan ikatan perkawinan biologis orang tua melahirkan kompleksitas hukum, terutama menyangkut status legalitas dan hak-hak inheren anak tidak sah.

Kedudukan hukum anak yang terlahir dari ikatan pernikahan yang sah di Indonesia telah ditetapkan secara tegas, yaitu anak sah dengan berbagai hak dan kewajiban yang menyertainya. Status anak tidak sah dianggap sebagai anak tidak diakui, yang memiliki implikasi hukum berbeda. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hubungan perdata anak tidak sah secara terbatas hanya diakui secara hukum dengan pihak ibu dan keluarga pihak ibu. Absennya ikatan perkawinan sah mengakibatkan hilangnya hak-hak sipil anak terhadap ayah kandungnya, termasuk hak untuk mewarisi harta atau membangun hubungan perdata. Ketentuan ini pun diterapkan kepada anak yang terlahir dari ikatan pernikahan yang tidak terdaftar di negara, walaupun secara agama ikatan tersebut diakui sah.

Ketidakjelasan status hukum anak tidak sah mengakibatkan berbagai permasalahan, terutama dalam hal administrasi kependudukan. Dalam akta kelahiran, anak tidak sah hanya mencantumkan nama ibu, sementara nama ayah tidak diakui secara hukum. Hal ini menciptakan diskriminasi yang merugikan anak, yang sebenarnya tidak memiliki kendali atas kondisi perkawinan orang tuanya. Banyak kasus, anak tidak sah yang tidak terdaftar merasa dikucilkan dan kehilangan hak-hak dasar mereka, yakni hak atas warisan, hak akademik, dan hak agar terjaminnya kesamaan hak di hadapan hukum.

Peristiwa ini mencerminkan adanya ketidakadilan serta kurangnya perlindungan hukum bagi anak tidak sah yang tidak terdaftar. Keadaan ini timbul akibat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang dalam praktiknya justru menyebabkan penderitaan dan ketidakadilan yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak. Di samping itu, hal ini tidak sejalan nilai-nilai kemanusiaan serta keragaman agama dan budaya yang sangat plural di Indonesia.[[20]](#footnote-20)

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai pihak telah mendorong adanya reformasi hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan anak. Beberapa langkah yang diusulkan meliputi pengesahan anak tidak sah sebagai keturunan yang diakui secara sah dengan memberikan hubungan perdata tak semata-mata kepada ibu, melainkan juga kepada ayah kandung. Langkah ini dianggap penting untuk menghapus diskriminasi dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak tidak sah.

Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Program edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dapat membantu pasangan yang menikah secara agama untuk segera mencatatkan perkawinan mereka di lembaga negara. Dengan demikian, hak anak sah tersebut dapat terjamin, dan mereka dapat tumbuh dalam suasana yang sarat dengan kasih sayang. dan perlindungan hukum.

Perkawinan bukan hanya persoalan individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam membangun generasi yang lebih baik. Dengan adanya reformasi hukum yang adil dan inklusif, diharapkan tidak ada lagi anak yang merasa terpinggirkan atau kehilangan hak-haknya hanya karena ketidaksempurnaan dalam administrasi perkawinan orang tuanya

### **Syarat dan Rukun Perkawinan**

UU secara komprehensif mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan individu yang terlibat, kelengkapan administrasi, tata cara pelaksanaan, hingga mekanisme yang harus diikuti. Regulasi ini bertujuan menjamin bahwa tahapan pernikahan berlangsung selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah ketetapan terkait langsung dengan calon pengantin. Ketentuan tersebut mencakup beberapa hal penting yang menjadi dasar sahnya suatu pernikahan, sebagai berikut: [[21]](#footnote-21)

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan keduan calon mempelai.

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas salama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

d. Apabila terdapat perselisihan pendapat di antara pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 2, 3, dan 4, atau jika salah satu pihak memilih untuk tidak memberikan pendapat, maka pengadilan setempat, atas permohonan calon mempelai, berwenang memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari seluruh pihak yang terkait.

e. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rukun nikah terdiri dari: (1). Sighat (akad) ijab-qabul, (2). Wali, (3). Dua orang saksi; [[22]](#footnote-22)

1) Sighat (akad) ijab-qabul Penikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul . Adapun yang dimaksud dengan ijab ialah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki – laki sebagai suami sah;

2) Wali Pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsung nya akad nikah antara laki – laki dan perempuan. Wali nikah ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan;

3) Dua orang saksi Di tengah – tengah masyarakat biasanya ada Naib, yaitu orang yang bertugas atau dapat mewakili kedua calon pengantin laki – laki dan perempuan atau mewakili salah seorang dari keduanya dalam akad pernikahan. Di Indonesia berdasarkan UU. No. 7 tahun 1974 tentang “Pencatatan Nikah, Thalak dan Rujuk”, naib juga bertugas mendaftar mencatat perkawinan. Naib ada di tiap Kantor Urusan Agama. Istilah naib sama dengan Penghulu, Khatib atau Imam.

### **Hubungan Orang Tua dengan Anak**

Secara yuridis, status anak sah memiliki keterkaitan langsung dengan keabsahan sebuah perkawinan yang diakui oleh hukum. Anak sah yakni mereka yang terlahir pada ikatan perkawinan yang telah disahkan secara hukum sebagai hasil dari pernikahan yang diakui, walaupun pada akhirnya perkawinan tersebut berakhir karena perceraian. Dalam perspektif ini, kelahiran anak tak dapat dipisahkan dari latar belakang pernikahan yang menjadi dasar hukum atas keberadaan mereka di mata negara dan masyarakat. Dengan demikian, status sah yang dimiliki seorang anak merupakan refleksi dari keberadaan dan keabsahan hubungan pernikahan. Anak yang tidak sah tidaklah memiliki kedudukan yang setara konsekuensinya, hak-hak hukum yang mereka peroleh akan berbeda dibandingkan anak yang sah. [[23]](#footnote-23)

a. Kedudukan hukum anak dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tua mereka. Sahnya perkawinan bukan hanya menjadi penentu legitimasi anak, tetapi juga akan berdampak pada berbagai aspek hidup anak. Dalam Undang-Undang Perkawinan, aspek ini diatur secara mendetail melalui Pasal 42 hingga Pasal 44 serta Pasal 55. Undang-undang tersebut membedakan secara jelas antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan anak yang tidak sah, sehingga kedudukan hukum kedua kategori anak ini berbeda dalam ranah keluarga dan masyarakat. Pasal 42 mendefinisikan anak yang diakui secara sah sebagai keturunan yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari ikatan perkawinan yang diakui secara resmi. Hal ini berarti bahwa anak yang dilahirkan setelah adanya pernikahan resmi, termasuk dalam kondisi kawin hamil, tetap mendapatkan status sebagai anak sah. Selain itu, anak yang dilahirkan setelah perceraian orang tua, selama ia merupakan hasil dari hubungan yang berlangsung dalam ikatan perkawinan yang sah, juga memiliki status anak sah.

Pembedaan status anak ini menciptakan garis batas yang tegas mengenai Hak dan kewajiban yang tersemat pada diri seorang anak dalam konteks keluarga. Anak sah memiliki hak untuk memperoleh pengakuan sepenuhnya dari kedua orang tuanya, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan, hingga warisan. Sebaliknya, anak yang tidak sah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh pengadilan. Oleh karena itu, sahnya perkawinan memiliki implikasi yang luas terhadap masa depan seorang anak, termasuk akses terhadap hak-hak dasar yang menjadi bagian dari tumbuh kembang mereka.

b. Kewajiban orang tua terhadap anak juga merupakan aspek untuk mendapatkan pengesahan sepenuhnya dari kedua orang tuanya, baik dalam. Dalam kehidupan masyarakat, ikatan antara ayah bunda dan putra putri tidak hanya didasarkan pada ikatan biologis semata, tetapi juga dipandu oleh prinsip tanggung jawab dan pemeliharaan yang terus berlangsung seiring waktu. Masyarakat Indonesia mengenal konsep "alimentatieplicht", yaitu kewajiban hukum orang tua untuk memelihara anak-anak mereka hingga anak mampu berdiri sendiri, baik dalam aspek finansial maupun sosial. Pemeliharaan ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar serta akses pendidikan dan perlindungan kesehatan. Kewajiban ini tidak memiliki batasan waktu yang kaku, karena dalam banyak situasi, orang tua tetap berperan aktif dalam kehidupan anak-anak mereka bahkan setelah anak menikah atau menyelesaikan pendidikan. Orang tua sering kali masih mendukung anak secara finansial, sebagai contoh mengejar cita-cita akademik pada level yang lebih lanjut atau membantu mereka memulai kehidupan rumah tangga.

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi setiap keluarga tidak selalu memungkinkan orang tua untuk menjalankan kewajiban ini secara penuh. Dalam banyak kasus, anak-anak terpaksa harus mencari nafkah sendiri sejak usia dini demi membantu orang tua mereka. Fenomena ini kerap terjadi di lingkungan keluarga dengan keterbatasan ekonomi, di mana anak-anak yang baru menyelesaikan pendidikan dasar sudah mulai bekerja untuk meringankan beban keluarga. Meski demikian, dalam kerangka hukum, Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban mutlak untuk mendidik anak mereka dengan seoptimal mungkin. Putusnya perkawinan melalui perceraian tidak serta-merta membebaskan seseorang dari kewajiban ini. Artinya, meskipun hubungan suami istri telah putus, Kewajiban asasi sebagai orang tua merupakan konsekuensi natural.

c. Selain kewajiban orang tua, hak-hak anak juga mendapatkan perhatian yang serius dalam beragam regulasi peraturan yang berlaku di Nusantara. Negara melalui sejumlah instrumen hukum berupaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak fundamental setiap anak tanpa memandang status mereka sebagai anak sah atau tidak sah. UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah beberapa bentuk nyata dari komitmen negara dalam menjaga dan memastikan hak inheren anak.

UU No. 4 Tahun 1979, misalnya, menitikberatkan pada upaya menciptakan kondisi kehidupan yang menjamin kesejahteraan anak secara holistik. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak agar mereka menjalani proses pertumbuhan yang semestinya. Dalam undang-undang ini, negara juga membedakan hak-hak anak secara umum dengan hak-hak anak yang memiliki kebutuhan khusus. Anak-anak yang mengalami hambatan fisik, mental, atau sosial mendapatkan perhatian lebih dalam bentuk pelayanan khusus yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam proses tumbuh kembang. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk dipelihara dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta setiap individu berhak atas lingkungan yang kondusif bagi kehidupan yang berkualitas dan sejahtera. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan berbagai fasilitas dan program yang mendukung kesejahteraan anak, baik melalui pendidikan formal, layanan kesehatan, maupun perlindungan sosial. Dalam konteks ini, peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah menjadi elemen penting yang saling mendukung dengan maksud mencapai perkembangan anak yang seutuhnya.

Dengan adanya berbagai ketentuan hukum ini, diharapkan setiap anak di Indonesia, tanpa memandang statusnya, dapat berkembang secara utuh dalam lingkungan yang kaya akan nutrisi dan stimulasi. Orang tua, sebagai pihak terdekat, memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan hak-hak yang layak, sementara negara dan masyarakat bertindak sebagai pelindung dan fasilitator yang membantu menciptakan ekosistem yang ideal untuk generasi mendatang.

## **Tinjauan Umum Mengenai Anak Luar Kawin**

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan, harta yang lebih berharga dari harta apapun di dunia. Anak-anak juga harus dipercaya oleh Tuhan dan dilindungi serta dirawat dengan baik. Sebab, semua anak mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dilindungi. Dengan kata lain, hak asasi anak tertuang dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB. Anak-anak adalah masa depan negara dan oleh karena itu berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Kedudukan anak-anak sebagai penanggung jawab generasi penerus sangatlah penting baik dalam keluarga maupun negaranya.

UU No.23 Tahun 2002 menyatakan bahwa, Anak merupakan yang berumur sebelum 18 tahun, termasuk bayi didalam kandungan. Kemudian, dikatakan, sebagai perlindungan anak apabila segala upaya perlindungan dan menjamin hak-haknya asasinya untuk hidup, berkembang, bertumbuh serta berpartisipasi secara maksimal dan mendapat keyakinan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi.[[24]](#footnote-24)

O’Donell menekankan pentingnya memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal.[[25]](#footnote-25)

Ironisnya, kelahiran anak tidak sah nikah mempunyai dampak yang signifikan terhadap status anak tersebut, yang menurut hukum perdata disebut sebagai anak luar nikah. Bahkan seringkali mereka mendapat stigma di masyarakat sebagai anak haram, anak hasil perselingkuhan, anak serumah, dan sebagainya. Sekalipun anak tidak sah tidaklah bersalah, stigma anak haram dapat berujung pada perlakuan berbeda terhadap anak tidak sah, baik dalam keluarga atau lingkungan sosial[[26]](#footnote-26).

Anak luar ikatan pernikahan di Indonesia tidak mempunyai pengakuan dan hak yang sama dengan anak tidak sah, dan terikat secara hukum dengan ibundanya dan keluarganya, sehingga rentan terhadap sengketa hukum mengenai status hukumnya kepastian. Sebaliknya laki-laki (ayah kandung dan keluarganya) tidak dapat memikul tanggung jawab atas anak tiak sah. Tentu saja hal ini tidak selaras dengan keadilan. Undang-undang diharapkan mampu memberi rasa aman, manfaat, dan keadilan teruntuk anak tidak sah, namun terbukti tidak mampu meminta pertanggung jawabannya.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberikan pengertian tentang anak sah yaitu pada Pasal 42, yang menyatakan bahwa;

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kemudian Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan bahwa;

”Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

UU Perkawinan telah secara jelas mendefinisikan anak sah, namun konsep anak luar nikah hanya dijelaskan secara tidak langsung melalui pertentangan dengan definisi anak sah. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pemahaman terhadap status hukum anak luar nikah. Namun, berdasarkan penjelasan mengenai anak sah dalam Pasal 42 UU Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah adalah anak yang tidak sah, yaitu anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan yang resmi. Dalam konteks ini, negara harus berperan sebagai entitas hukum yang memberikan kepastian dan keadilan.

1. “Friska Marselina Maramis. *Hak Mewaris Anak DI Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.* Lex Crimen. Vol.VI. (2017)” [↑](#footnote-ref-1)
2. “Rosyid, M. A., Nurhasanah, V. W., Atikasari, W., & Rayana, N. A. (2023). Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 Kuhperdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018. *Diponegoro Private Law Review*, *10*(1), 85-106.” [↑](#footnote-ref-2)
3. “Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.Hukm*. Kedudukan Hukum Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Presindo, 2020.” [↑](#footnote-ref-3)
4. “Eunika Loist Hutasoit, F. J. *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam.* Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, vol.16, 420-437. (2024, Juli-Desember).” [↑](#footnote-ref-4)
5. “Ibid.,” [↑](#footnote-ref-5)
6. “Adillah, S. U. (2011). *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*, 104-112.” [↑](#footnote-ref-6)
7. “Kusumawarni, B. A. (2022). *Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. Unizar Recht Journal (URJ)*, *1*(4).” [↑](#footnote-ref-7)
8. “Chairan, A. T. (n.d.). *Hak kewarisan anak luar nikah berdasarkan hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 (Analisis pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Perkawinan).* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang. Email: atenspadangchairun@yahoo.co.id.” [↑](#footnote-ref-8)
9. “Cahyono, D. A. T. (2023). *Analisis hak atas harta warisan anak yang lahir di luar nikah menurut KUHPerdata (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.” [↑](#footnote-ref-9)
10. “Pradipta, V., & Martinelli, I. (2018). *Pergeseran nilai hak waris terhadap anak luar kawin diakui (Studi kasus putusan Nomor 239/Pdt. G/2015/PN. JKT. PST). Jurnal Hukum Adigama, 1*(1), 661-685.” [↑](#footnote-ref-10)
11. “Oktavia, N. (2024). *Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Yang Memiliki Anak Angkat Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi).” [↑](#footnote-ref-11)
12. “Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan pembagian harta warisan perspektif hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, *5*(1).” [↑](#footnote-ref-12)
13. “Basri, S. (2020). Hukum waris Islam (Fara’id) dan penerapannya dalam masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 1*(2), 37-46.” [↑](#footnote-ref-13)
14. “Baca artikel detikhikmah, "Ketentuan Pembagian Warisan Menurut Islam, Berapa Besarannya?" selengkapnya <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7464859/ketentuan-pembagian-warisan-menurut-islam-berapa-besarannya>” [↑](#footnote-ref-14)
15. “Poespasari, E. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.” [↑](#footnote-ref-15)
16. “Saputri, R. K. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, *2*(2), 205-220.” [↑](#footnote-ref-16)
17. “Suwasta, A. D., Juhana, U., Alfiany, T. F., & Mulyanti, A. S. (2024). *Pengantar hukum perdata*. TOHAR MEDIA.” [↑](#footnote-ref-17)
18. “Ramadhaniati, N. K. (2024). *Rekontruksi Hukum Waris di Indonesia Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).” [↑](#footnote-ref-18)
19. “Cahyono, D. A. T. (2023). Analisis hak atas harta warisan anak yang lahir di luar nikah menurut KUHPerdata (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.” [↑](#footnote-ref-19)
20. “Saraswati Rika. (2015), Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,” [↑](#footnote-ref-20)
21. “Cahyono, D. A. T. (2023). Analisis hak atas harta warisan anak yang lahir di luar nikah menurut KUHPerdata (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.” [↑](#footnote-ref-21)
22. “Ibid., hlm. 22” [↑](#footnote-ref-22)
23. “Rosnidar Sembiring. (2016). Hukum Keluarga: Harta – Harta Benda dalam Perkawinan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.” [↑](#footnote-ref-23)
24. “Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 2(1), 88–101. https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101” [↑](#footnote-ref-24)
25. “Femmy Silaswaty Faried. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri. Jurnal Serambi Hukum, 11(01), 41–55.” [↑](#footnote-ref-25)
26. “Aryanto, A. D. (2015). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. Bilancia, 9(2), 122–134. Retrieved from https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/283” [↑](#footnote-ref-26)